



► PEREKONOMIAN DAERAH

Kerja Keras Menekan Ketimpangan Pengeluaran

UMBULHARJO- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja berupaya menekan angka gini rasio atau ketimpangan pengeluaran di wilayahnya dengan meningkatkan pendapatan kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Kelompok itu juga menjadi sasaran pelaku dan program pembangunan untuk meningkatkan pendapatan sehingga memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di atas garis kemiskinan.

Persoalan gini rasio atau ketimpangan pengeluaran memang masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti dibersihkan Pemkot Jogja. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, rasio gini daerah perkotaan pada September 2022 berada di angka 0,468 atau naik dibanding Maret 2022 lalu yang berada di angka 0,446. Kondisi itu juga meningkat jika dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar 0,443.

Kepala Bappeda Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan peningkatan pendapatan kepada 40% kelompok

► Peningkatan pendapatan kepada 40% kelompok dengan pendapatan rendah itu dilakukan dengan mengandalkan sektor unggulan.

► Selain faktor wisata, daya ungkit lain yang juga diupayakan yakni dengan memperluas akses digital.

dengan pendapatan rendah itu dilakukan dengan mengandalkan sektor unggulan yang ada di wilayahnya. Pariwisata masih menjadi tumpuan utama sebagai daya ungkit agar pendapatan warga yang berada pada garis kemiskinan meningkat.

"Konsepnya dengan penyusunan perencanaan pariwisata berbasis kewilayahan berupa titik ungkit ekonomi baru di kelurahan," kata Agus, Selasa (17/1).

Selain faktor wisata, daya ungkit lain yang juga diupayakan yakni dengan memperluas akses digital kepada kelompok itu. Upaya dalam meningkatkan literasi digital kepada warga masyarakat didorong agar pemanfaatan teknologi informasi bisa dijamah oleh masyarakat luas. "Sektor itu juga menjadi salah satu andalan kita. Ditambah dengan keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan,"

kata Agus.

Dia mengklaim, sistem penganggaran pada APBD juga dirancang untuk kembali kepada masyarakat. Sistemnya melalui pengelolaan sistem informasi pemesanan jamuan kuliner dari kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Setiap kelompok diwajibkan beranggotakan warga miskin. Sistem informasinya dinamakan *Nglaris*. Kebijakan ini merupakan program pemasaran dari UMKM setempat ke lingkungan pemerintah.

"Perluasan akses digital diberikan kepada UMKM dan pedagang pasar untuk menjamin kemampuan UMKM dan pedagang pasar dalam menghadapi era digital," katanya.

Penguatan Data

Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuriadijaya menyebut, pembangunan perkotaan yang bertumpu pada suatu wilayah atau aspek tertentu memang berpotensi memperbesar gini rasio. Upaya dalam menekan ketimpangan jurang pendapatan warga dilakukan dengan penguatan data.

Menurutnya, arah program yang dijalankan di Pemkot Jogja sebisa mungkin juga menuju pada pengurangan angka gini rasio.

Oleh karenanya program pemerataan tidak hanya diampu oleh salah satu atau beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) saja, melainkan semuanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005